

FGD

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebagai Bahan Masukan RKPD Tahun 2028

Oleh

Dr. Nur Widiastuti, SE., M.Si

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Senin, 30 Maret 2026

Program Strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Peluang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Menu Paparan

Program Makan Bergizi Gratis: landasan hukum, anggaran, pengalaman negara lain, kasus-kasus MBG.

Analisis SWOT MBG

Koperasi Desa Merah Putih: landasan hukum dan Gambaran umum

Analisis SWOT KDMP

MITIGASI RESIKO



PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS



Landasan Hukum dan Anggaran

Perpres No. 139 Tahun 2024: Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kedeputan di Lingkungan Sekretariat Kabinet (Cikal bakal Badan Gizi Nasional).

Perpres No. 83 Tahun 2024: Tentang Pembentukan **Badan Gizi Nasional (BGN)** sebagai lembaga pemegang otoritas program.

UU APBN 2025: Menetapkan MBG sebagai program prioritas nasional.

Undang-Undang Kesehatan: Terkait standar gizi dan keamanan pangan.

APBN 2025: Alokasi awal sebesar **Rp71 Triliun**. 2026 223,5 Triliun

Menyerap 1,5 juta tenaga kerja

Pengalaman Negara Lain

India: Memiliki program makan siang sekolah terbesar di dunia melalui *Midday Meal Scheme* (kini bagian dari program POSHAN), yang menjangkau sekitar 118–125 juta anak setiap hari.

Finlandia: Negara pertama yang menerapkan makan siang gratis secara universal bagi seluruh siswa sejak tahun 1943.

Swedia: Memberikan makan siang gratis bagi semua siswa usia 7–16 tahun, dan sebagian besar siswa usia 16–19 tahun.

Estonia: Menyediakan satu makanan hangat gratis setiap hari bagi seluruh siswa sekolah dasar dan menengah sejak 2002.

Brasil: Memperluas programnya menjadi universal bagi seluruh anak di sekolah negeri pada tahun 2009 untuk mengatasi obesitas dan memperbaiki edukasi nutrisi.

Pengalaman Negara Lain

Thailand: Telah memulai program makan siang sekolah sejak 1952 dan menjadi salah satu model yang konsisten di Asia Tenggara.

Jepang: Sekitar 30% pemerintah daerah di Jepang menyediakan makan siang yang sepenuhnya gratis, sementara sisanya memberikan subsidi besar dengan standar nutrisi yang sangat ketat.

Malaysia: Memiliki program *Rancangan Makanan Tambahan* (RMT) yang fokus pada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.

Amerika Serikat: Menyediakan makan siang gratis atau harga yang dikurangi bagi jutaan siswa dari keluarga berpendapatan rendah melalui *National School Lunch Program*.

Korea Selatan: Dikenal memiliki salah satu program makan siang sekolah paling sehat di dunia dengan fokus pada bahan segar dan nutrisi seimbang

Secara global, terdapat **School Meals Coalition** yang beranggotakan hampir 100 negara (termasuk Indonesia) dengan komitmen untuk memastikan setiap anak memiliki akses ke makanan bergizi di sekolah pada tahun 2030

KASUS-KASUS MBG

- Keracunan Masal
- Kelayakan Standar Mutu
- Masalah Tata Kelola dan Administrasi
- Kasus Keracunan Massal Ini merupakan kasus yang paling menonjol selama masa uji coba hingga implementasi penuh.
- Berdasarkan data per Februari 2026, dilaporkan lebih dari **20.000 siswa** mengalami kasus keracunan.

KELAYAKAN STANDAR MUTU DAN ADMINISTRASI

- **Makanan Tidak Layak:** Penemuan makanan basi di Tangerang dan daging ayam yang masih mentah di Sumba Timur.
- **Kandungan Gizi:** Adanya kekhawatiran mengenai ketimpangan gizi karena anggaran per porsi yang sempit dikabarkan turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 di beberapa titik.
- **Standar Rasa:** Keluhan mengenai rasa makanan yang kurang disukai anak-anak, sehingga kontrol kualitas rasa menjadi poin evaluasi penting
- **Maladministrasi:** Ditemukan potensi maladministrasi seperti ketidakteraturan distribusi makanan yang membebani tugas guru di sekolah.
- **Transparansi Mitra:** Penetapan mitra yayasan dan SPPG yang dinilai belum transparan dan rawan konflik kepentingan.
- **Sumber Daya Manusia:** Adanya laporan keterlambatan pembayaran honorarium bagi petugas atau relawan program.

Tindakan Pemerintah

Penutupan Dapur: Lebih dari **1.000 dapur MBG ditutup** karena tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan.

Permintaan Maaf: Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi meminta maaf atas rentetan kasus keracunan yang terjadi.

Peningkatan Pengawasan: Instruksi untuk melakukan *rapid test* pada makanan, penyediaan alat kebersihan di setiap dapur, dan kewajiban mencuci tangan bagi siswa.

Biaya Pengobatan: Pemerintah memastikan seluruh biaya pengobatan korban keracunan ditanggung oleh negara.

Analisis SWOT
**Program Makan Bergizi
Gratis (MBG)** dalam
konteks **pemberdayaan
masyarakat** melihat
bagaimana program ini
bukan sekadar pembagian
makanan, tetapi mesin
penggerak ekonomi lokal
(khususnya melalui
Koperasi Desa Merah Putih
atau UMKM).

*Kekuatan
Kelemahan
Peluang
Ancaman
Strategi*

Strengths (Kekuatan)

Dukungan Politik yang Kuat: Merupakan program prioritas nasional yang didukung langsung oleh Presiden, sehingga memiliki kepastian anggaran dan kebijakan.

Kelembagaan Khusus: Adanya **Badan Gizi Nasional** memastikan program memiliki manajemen terpusat dan fokus, bukan sekadar tugas sampingan kementerian lain.

Skala Ekonomi Besar: Dengan jutaan sasaran, program ini memiliki daya tawar tinggi untuk menstabilkan harga pangan di tingkat petani.

Standar Nutrisi Terukur: Menu disusun berdasarkan ahli gizi, sehingga kualitas asupan lebih terjamin dibanding jajan sembarangan.

Pangsa Pasar Terjamin: Adanya permintaan tetap (captive market) setiap hari dari sekolah/pesantren, sehingga unit usaha masyarakat memiliki kepastian pembeli

Weaknesses (Kelemahan)

Logistik dan Rantai Pasok: Kendala distribusi di daerah terpencil atau kepulauan yang bisa menghambat kesegaran bahan makanan.

Kapasitas Produksi Lokal: Belum semua desa memiliki kelompok tani atau peternak yang mampu menyuplai volume besar secara konsisten setiap hari.

Standar Higiene: Keterbatasan pengetahuan masyarakat lokal mengenai sertifikasi sanitasi dan keamanan pangan (HACCP/BPOM).

Manajemen Keuangan: Risiko keterlambatan pembayaran klaim anggaran yang bisa mengganggu arus kas operasional skala kecil.

Opportunities (Peluang)

Revitalisasi Ekonomi Lokal: Menghidupkan ekosistem UMKM dan koperasi petani/peternak di sekitar satuan pelayanan (sekolah).

Peningkatan Kualitas SDM: Dalam jangka panjang (10-20 tahun), Indonesia akan memiliki generasi yang lebih cerdas dan bebas *stunting* untuk mencapai **Indonesia Emas 2045**.

Edukasi Gizi Massal: Menjadi sarana mengubah pola makan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya protein hewani dan sayuran.

Penciptaan Lapangan Kerja: Menyerap tenaga kerja lokal sebagai pengelola dapur, kurir, dan staf administrasi program.

Threats (Ancaman)

Monopoli Vendor Besar: Risiko masuknya perusahaan besar (korporasi) yang mengambil alih jatah suplai, sehingga UMKM lokal tersingkir.

Fluktuasi Harga Bahan Baku: Kenaikan harga pangan (cabai, beras, daging) di pasar dapat membuat biaya produksi melebihi plafon anggaran per porsi.

Kebocoran Anggaran (Korupsi): Risiko penyalahgunaan dana di tingkat birokrasi atau pengurus yang mengurangi kualitas makanan bagi anak-anak.

Isu Keamanan Pangan: Risiko keracunan massal jika kontrol kualitas di dapur komunitas tidak diawasi dengan ketat, yang bisa menghentikan program seketika



Strategi

Pemanfaatan Kekuatan (S-O)	Gunakan kepastian pasar MBG untuk memberikan pinjaman modal dari Koperasi kepada petani lokal agar mereka bisa ekspansi produksi.
Mengatasi Kelemahan (W-O)	Mengadakan pelatihan sertifikasi higiene makanan bagi ibu-ibu PKK agar dapur komunitas memenuhi standar kesehatan resmi.
Menghadapi Ancaman (S-T)	Membuat regulasi lokal yang mewajibkan minimal 70% bahan baku MBG harus dibeli dari petani desa setempat untuk mencegah monopoli vendor dari luar



Koperasi Desa Merah Putih



Situs Resmi Koperasi Desa Merah Putih

kopdesmerahputih.kop.id: Platform pendaftaran mandiri (*self-declare*) dan dashboard nasional untuk memantau perkembangan pembentukan koperasi di seluruh desa secara *real-time*.

simkopdes.go.id: Portal resmi untuk pengelolaan data koperasi desa, termasuk menu untuk Pendaftaran Anggota di tiap wilayah.

merahputih.kop.id/daftar: Laman khusus untuk pendaftaran koperasi baru atau revitalisasi koperasi yang sudah ada

sppi-kdkmp.id: Situs pendaftaran untuk **Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)** yang ditugaskan mendampingi Koperasi Desa Merah Putih.

Instagram @kemenkop: Sumber informasi terkini mengenai kebijakan dan panduan teknis operasional koperasi dari Kementerian Koperasi RI.

Sumber Dana

Inpres No 9
Tahun 2025
tentang
Percepatan
Pembentukan
KDMP

**Perbankan (Himpunan Bank
Milik Negara - Himbara)**

Dana Desa

APBN/APBD

Partisipasi Masyarakat

ANALISIS SWOT KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Strengths (Kekuatan)

Dukungan Pemerintah yang Kuat: Memiliki landasan hukum yang jelas (seperti Inpres) dan akses langsung ke modal awal dari pemerintah.

Bunga Pinjaman Rendah: Akses permodalan melalui Himbara dengan bunga hanya **6%**, jauh di bawah bunga komersial biasa.

Basis Anggota Lokal: Memiliki kedekatan emosional dan geografis dengan warga desa, sehingga lebih mudah membangun kepercayaan.

Integrasi Dana Desa: Kemudahan dalam penggunaan alokasi Dana Desa untuk infrastruktur (gudang/kantor)

Weaknesses (Kelemahan)

Kapasitas SDM Terbatas: Pengelola di tingkat desa seringkali memiliki keterbatasan dalam literasi keuangan dan manajemen profesional.

Ketergantungan Modal Luar: Terlalu mengandalkan dana pemerintah atau pinjaman bank, sehingga kemandirian modal internal (simpanan anggota) mungkin rendah di awal.

Sistem Teknologi Belum Merata: Digitalisasi pencatatan dan transaksi di pelosok desa sering terkendala infrastruktur interne

Opportunities (Peluang)

Pusat Distribusi Logistik: Berpotensi menjadi pengumpul utama hasil tani/ternak warga untuk memotong rantai tengkulak.

Digitalisasi Ekonomi Desa: Peluang menerapkan aplikasi pembayaran (PPOB) untuk tagihan listrik, pulsa, dan bantuan sosial.

Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka unit usaha baru (pengolahan produk pasca-panen) yang menyerap tenaga kerja lokal.

Kolaborasi Antar-Lembaga: Kerjasama dengan BUMDes atau perusahaan swasta untuk program *supply chain*

Threats (Tantangan)

Persaingan dengan Rentenir: Tengkulak atau pinjol ilegal yang menawarkan proses instan tanpa birokrasi ketat sering kali masih menjadi pilihan warga.

Risiko Kredit Macet: Gagal bayar dari anggota (terutama sektor pertanian yang bergantung pada cuaca) bisa mengganggu kesehatan finansial koperasi.

Intervensi Politik Lokal: Risiko konflik kepentingan dalam pemilihan pengurus atau penyaluran bantuan di tingkat desa.

Ketidakstabilan Ekonomi: Perubahan kebijakan pemerintah pusat atau fluktuasi harga komoditas pasar global

Strategi

SO Strategy: Gunakan bunga rendah (S) untuk membiayai alat pengolahan pasca-panen guna meningkatkan nilai jual produk desa (O).

WO Strategy: Melakukan pelatihan manajemen profesional bagi pemuda desa (W) agar mampu mengelola modal besar dari pemerintah (O).

ST Strategy: Manfaatkan status resmi sebagai koperasi negara (S) untuk mengedukasi warga agar berpindah dari rentenir ke lembaga formal yang lebih aman (T)

Mitigasi Resiko



MITIGASI RESIKO

Mitigasi Resiko Kredit Gagal Bayar

- **Analisis 5C yang Ketat:** Meskipun bersifat sosial, pemberian pinjaman harus tetap melalui seleksi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition*.
- **Sistem Tanggung Renteng:** Membentuk kelompok kecil anggota (5-10 orang) yang saling menjamin. Jika satu anggota macet, anggota lain dalam kelompok ikut bertanggung jawab.
- **Asuransi Kredit:** Mengasuransikan pinjaman besar melalui lembaga penjamin seperti **Askrindo** atau **Jamkrindo** untuk melindungi modal koperasi jika terjadi gagal bayar masal.

Mitigasi Resiko operasional SDM

- Peningkatan kompetensi dan kapasitas, dengan adanya pendampingan, buku pedoman pelaksanaan dan melatih kader.
- **Standarisasi dan Digitalisasi Operasional**, ada **system digitalisasi teknologi untuk operasional dan system laporan untuk mengantisipasi human error**
- **Pengawasan dan Tata Kelola (Good Corporate Governance)**, ada **pembinaan dan audit secara berkala**

MITIGASI RESIKO

Mitigasi Resiko pasar dan komoditas

- **Diversifikasi Unit Usaha:** Jangan hanya mengandalkan satu sektor (misal: simpan pinjam saja). Buka unit toko sembako, jasa pembayaran listrik (PPOB), atau penyewaan alat pertanian.
- **Sistem Resi Gudang:** Membangun gudang penyimpanan agar hasil panen anggota bisa disimpan saat harga jatuh dan dijual kembali saat harga tinggi.
- **Off-taker (Pembeli Siaga):** Menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan besar atau distributor untuk menjamin penyerapan hasil tani anggota dengan harga dasar yang stabil

Mitigasi Resiko Hukum dan Politik

- **SOP yang Baku:** Memiliki aturan main (AD/ART) yang jelas tentang syarat menjadi pengurus, agar posisi strategis tidak diisi berdasarkan kedekatan politik dengan aparat desa.
- **Legalitas Lengkap:** Memastikan seluruh perizinan dan sertifikasi NIK (Nomor Induk Koperasi) selalu aktif agar bantuan dari pusat/provinsi tidak terhambat

Mitigasi Resiko Likuiditas

Cadangan Modal: Menetapkan batas minimal dana cadangan (misal 20% dari total aset) yang tidak boleh dipinjamkan dan harus tetap ada di kas atau bank.

Promosi Simpanan

Sukarela: Menawarkan bunga simpanan yang menarik agar warga lebih rajin menabung, sehingga rasio modal sendiri lebih kuat dibanding utang bank

Fitur Perbandingan	Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)	Koperasi Konvensional	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Inisiatif Pembentukan	Instruksi Pemerintah Pusat (Inpres/Inisiatif Presiden).	Kesadaran mandiri kelompok masyarakat/anggota.	Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes).
Status Kepemilikan	Berbasis Anggota (Masyarakat Desa).	Berbasis Anggota (Kelompok tertentu).	Milik Pemerintah Desa (Pemdes).
Sumber Modal Utama	Dana Desa, APBN, Bank Himbara, & Simpanan Anggota.	Simpanan Pokok & Wajib Anggota.	Kekayaan Desa yang dipisahkan (Dana Desa).
Tujuan Utama	Memutus rantai rentenir & penguatan ekonomi desa secara masif.	Kesejahteraan ekonomi spesifik bagi para anggotanya.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) & pelayanan umum.
Pengelolaan	Profesional, terpantau sistem digital nasional (SIMKOPDES).	Mandiri oleh pengurus yang dipilih anggota.	Dikelola oleh pelaksana operasional yang bertanggung jawab ke Kepala Desa.
Dasar Hukum Utama	UU Perkoperasian & Inpres terkait.	UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	UU Desa & PP No. 11 Tahun 2021.
Sasaran Pengguna	Masyarakat desa umum (terutama ekonomi mikro).	Anggota koperasi yang terdaftar saja.	Seluruh warga desa dan konsumen umum.



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

POLICY BRIEF

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Sebagai Masukan untuk RKPD Tahun 2028 Kabupaten Sleman

Disusun oleh: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman | 30 Maret 2026

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Policy brief ini disusun sebagai bahan masukan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2028, khususnya pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Dokumen ini merangkum hasil telaah dan evaluasi terhadap dua program prioritas nasional yang secara langsung berpengaruh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dua program tersebut dipandang bukan sekadar instrumen distribusi manfaat sosial, melainkan sebagai mesin penggerak ekonomi lokal yang berpotensi mentransformasi struktur perekonomian kalurahan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor menjadi prasyarat utama agar kedua program dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam arah pembangunan daerah Kabupaten Sleman.

Pesan Kunci Kebijakan

Keberhasilan Program MBG dan KDMP di Kabupaten Sleman sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan partisipatif, tata kelola yang transparan, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta integrasi yang koheren dengan dokumen perencanaan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu memastikan bahwa kedua program tersebut tidak berjalan secara parsial, melainkan saling menopang dalam satu ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

II. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS KEBIJAKAN

Dalam kerangka pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dua program strategis dicanangkan sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang untuk memastikan pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah sekaligus menciptakan ekosistem pengadaan pangan berbasis komunitas lokal. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 guna mempercepat terbentuknya lembaga ekonomi berbasis anggota di seluruh desa Indonesia.

Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah dengan tingkat pembangunan yang relatif maju di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan implementasi kedua program tersebut. Kondisi ini didukung oleh basis pertanian yang produktif, jaringan kelembagaan masyarakat yang telah mapan, serta kapasitas fiskal daerah yang memadai. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural dan operasional perlu diidentifikasi secara cermat agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

2.1 Dasar Hukum

Pelaksanaan kedua program tersebut berlandaskan pada kerangka regulasi nasional yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadi acuan dasar pembentukan dan pengelolaan koperasi di Indonesia.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi landasan operasional KDMP secara nasional.
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat desa.
- Regulasi teknis terkait pengelolaan anggaran dan pengadaan dalam program MBG yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

III. ANALISIS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

3.1 Peluang yang Dapat Dimanfaatkan

Program MBG dipandang membawa peluang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sleman, terutama apabila rantai pasok pengadaan bahan baku diarahkan kepada pelaku usaha lokal. Beberapa dimensi peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- Kepastian pasar yang tercipta melalui program MBG dapat dimanfaatkan sebagai insentif bagi kelompok tani dan UMKM pangan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi.
- Jaringan dapur komunitas yang terbentuk berpotensi menjadi wahana pemberdayaan kaum perempuan, khususnya kelompok PKK, melalui pelibatan aktif dalam proses pengolahan dan distribusi makanan.
- Kebutuhan logistik yang besar dan berkesinambungan membuka ruang bagi koperasi desa untuk berperan sebagai agregator bahan baku dan distributor lokal.

3.2 Tantangan dan Permasalahan Teridentifikasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi awal program MBG secara nasional, sejumlah permasalahan kritis telah teridentifikasi yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan daerah:

Kasus Keracunan Massal

Hingga Februari 2026, dilaporkan lebih dari 20.000 siswa di berbagai wilayah mengalami kasus keracunan makanan selama masa uji coba dan implementasi awal program. Kondisi ini menjadi indikator kritis perlunya penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dalam seluruh rantai distribusi.

Di luar kasus keracunan, permasalahan lain yang perlu diantisipasi meliputi:

- Kelayakan dan Standar Mutu: Ditemukannya makanan tidak layak konsumsi di beberapa wilayah, termasuk makanan basi dan bahan yang tidak matang sempurna, mengindikasikan lemahnya pengawasan kualitas di tingkat dapur produksi.
- Ketimpangan Kandungan Gizi: Adanya kekhawatiran mengenai penurunan nilai gizi akibat penyesuaian anggaran per porsi yang dilaporkan berfluktuasi, sehingga efektivitas program dalam memenuhi target gizi perlu dievaluasi secara berkala.
- Potensi Maladministrasi: Ditemukan indikasi ketidaktertiban dalam distribusi makanan yang berdampak pada beban tugas guru, serta proses penetapan mitra dan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang dinilai belum sepenuhnya transparan.

- Keterlambatan Honorarium: Terdapat laporan keterlambatan pembayaran honorarium bagi petugas dan relawan program, yang berpotensi menurunkan motivasi dan keberlanjutan sumber daya manusia pelaksana.

3.3 Rekomendasi Strategis untuk MBG

Dimensi Strategis	Langkah yang Direkomendasikan
Kualitas dan Keamanan Pangan	Pemberlakuan sertifikasi higiene dan sanitasi bagi seluruh mitra dapur komunitas serta pengadaan inspeksi berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
Penguatan Ekonomi Lokal	Penetapan regulasi daerah yang mewajibkan minimal 70% bahan baku MBG diperoleh dari petani dan UMKM lokal Kabupaten Sleman.
Transparansi Pengadaan	Penerapan sistem e-procurement terbuka dalam proses seleksi mitra SPPG dan yayasan pengelola, disertai mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses.
Pemberdayaan Perempuan	Pelibatan kelompok PKK dan perempuan desa melalui pelatihan sertifikasi keamanan pangan untuk mengelola dapur komunitas secara profesional.
Pengawasan Multistakeholder	Pembentukan tim monitoring lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga independen untuk memastikan standar mutu terpenuhi.

IV. ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan lembaga ekonomi berbasis anggota yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. KDMP dirancang untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat desa terhadap rentenir, sekaligus memperkuat struktur ekonomi mikro di tingkat kalurahan. Berbeda dari koperasi konvensional maupun BUMDes, KDMP memiliki sumber permodalan yang lebih beragam, meliputi Dana Desa, APBN, dukungan perbankan Himbara, serta simpanan anggota.

4.1 Posisi KDMP dalam Lanskap Kelembagaan Desa

Aspek Perbandingan	Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)	BUMDes
--------------------	----------------------------------	--------

Inisiasi Pembentukan	Instruksi Pemerintah Pusat (Inpres No. 9/2025)	Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa
Status Kepemilikan	Berbasis anggota (masyarakat desa)	Milik Pemerintah Desa
Sumber Modal Utama	Dana Desa, APBN, Bank Himbara, simpanan anggota	Kekayaan desa yang dipisahkan
Tujuan Utama	Memutus rantai rentenir dan penguatan ekonomi desa secara masif	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
Sistem Pengelolaan	Profesional, terpantau sistem digital nasional (SIMKOPDES)	Dikelola pelaksana yang bertanggung jawab ke Kepala Desa

4.2 Kekuatan dan Peluang KDMP

- Dukungan regulasi yang kuat dari Pemerintah Pusat memberikan legitimasi dan akses pembiayaan yang lebih luas dibandingkan koperasi konvensional.
- Sistem digitalisasi melalui SIMKOPDES memungkinkan transparansi operasional dan pemantauan kinerja secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan.
- Sinergi yang potensial dengan program MBG menjadikan KDMP sebagai agregator bahan baku dan distributor yang terpercaya, sehingga kedua program dapat saling memperkuat.
- Potensi diversifikasi unit usaha — dari simpan pinjam, toko sembako, layanan PPOB, hingga penyewaan sarana pertanian — memperluas basis pendapatan koperasi.

4.3 Kelemahan dan Tantangan yang Perlu Diantisipasi

- Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah dapat menciptakan ketidakberlanjutan apabila program dihentikan atau anggaran dipangkas.
- Kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi di tingkat desa seringkali belum memadai untuk mengelola operasional yang kompleks dan terstandardisasi.
- Risiko politisasi dalam pengisian jabatan pengurus koperasi apabila mekanisme seleksi tidak diatur secara ketat dalam AD/ART.
- Persaingan dengan lembaga keuangan informal yang telah berakar lama di masyarakat dapat menghambat proses transisi kepercayaan masyarakat.

4.4 Strategi Mitigasi Risiko KDMP

Mitigasi Risiko Kredit (Gagal Bayar)

Penerapan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) secara ketat dalam setiap proses pemberian pinjaman. Sistem tanggung renteng dalam kelompok anggota (5–10

orang) diterapkan agar solidaritas sosial menjadi mekanisme pengaman kredit. Selain itu, penjaminan kredit melalui lembaga seperti Askrindo atau Jamkrindo direkomendasikan untuk pinjaman dalam jumlah besar.

Mitigasi Risiko Operasional SDM
Peningkatan kompetensi pengurus dilakukan secara sistematis melalui pendampingan teknis, penyusunan buku pedoman operasional, serta pelatihan kader secara berkala. Standarisasi dan digitalisasi proses operasional diterapkan guna meminimalkan human error, disertai audit internal dan pembinaan Good Corporate Governance secara periodik.

Mitigasi Risiko Pasar dan Komoditas
Diversifikasi unit usaha koperasi mencakup lebih dari satu sektor untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Sistem resi gudang dibangun agar anggota dapat menyimpan hasil panen saat harga jatuh dan menjual kembali saat harga menguntungkan. Perjanjian off-taker dengan perusahaan atau distributor besar menjamin penyerapan produk anggota pada harga dasar yang stabil.

V. ANALISIS SWOT TERPADU: MBG DAN KDMP

Analisis SWOT berikut menyajikan peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kedua program secara terintegrasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sleman.

KEKUATAN (Strengths) • Dukungan regulasi nasional yang kuat dan anggaran yang terjamin • Program menyentuh kebutuhan dasar masyarakat (pangan dan keuangan inklusif) • Kepastian pasar yang mendorong peningkatan produksi petani lokal • Sistem digital SIMKOPDES yang mendukung transparansi	KELEMAHAN (Weaknesses) • Kapasitas SDM pengelola di tingkat desa yang belum merata • Risiko maladministrasi dan kurangnya transparansi mitra pelaksana MBG • Ketergantungan finansial terhadap dana pemerintah pusat • Standar mutu pangan yang belum terverifikasi secara sistematis
PELUANG (Opportunities) • Sinergi MBG-KDMP sebagai ekosistem pangan dan keuangan inklusif desa • Pemberdayaan perempuan melalui dapur	ANCAMAN (Threats) • Dominasi vendor luar yang meminggirkan pelaku usaha lokal • Politisasi koperasi oleh aparat desa yang

komunitas berbasis PKK • Penguatan rantai pasok lokal dan peningkatan pendapatan petani • Digitalisasi koperasi sebagai model tata kelola desa modern	merugikan anggota • Fluktuasi harga komoditas yang mengancam stabilitas neraca koperasi • Krisis kepercayaan masyarakat akibat kegagalan program di fase awal
---	---

VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK RKPD TAHUN 2028

Berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap dua program strategis tersebut, berikut dirumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2028:

6.1 Integrasi Program dalam Dokumen Perencanaan Daerah

- Program MBG dan KDMP perlu diposisikan secara eksplisit dalam nomenklatur program dan kegiatan RKPD 2028 agar memiliki dasar penganggaran yang jelas dan terukur.
- Indikator kinerja yang terukur (KPI) ditetapkan untuk setiap aspek implementasi, mencakup cakupan penerima manfaat, volume pengadaan lokal, dan jumlah anggota koperasi aktif.
- Koordinasi lintas OPD dioptimalkan melalui forum perencanaan terpadu yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BAPPEDA.

6.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan

- Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pengurus KDMP serta pengelola dapur komunitas MBG diprioritaskan dalam RKPD 2028 sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
- Program pendampingan teknis dilaksanakan secara terstruktur melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki kapasitas relevan.
- Standardisasi Operasional Prosedur (SOP) bagi seluruh unit pengelola MBG dan KDMP di Kabupaten Sleman disusun dan diberlakukan secara seragam.

6.3 Penguatan Rantai Pasok Lokal

- Regulasi daerah (Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati) yang mewajibkan penggunaan bahan baku lokal dalam program MBG diterbitkan dengan batas minimum yang terukur.
- Sistem data base petani dan UMKM pangan lokal dibangun dan diintegrasikan dengan sistem pengadaan MBG agar penyerapan produk lokal dapat ditelusuri secara akuntabel.
- Koperasi Desa Merah Putih difasilitasi untuk berperan sebagai aggregator dan distributor bahan baku MBG, sehingga kedua program tersebut saling menguntungkan secara ekonomi.

6.4 Tata Kelola dan Transparansi

- Mekanisme seleksi mitra pelaksana MBG diperketat melalui sistem e-procurement yang terbuka, disertai pengumuman hasil seleksi secara publik dan akses pengaduan masyarakat.
- Audit independen terhadap pengelolaan KDMP dilaksanakan secara berkala, dengan hasil yang dipublikasikan kepada anggota koperasi dan masyarakat luas.
- Sistem pelaporan berbasis teknologi informasi dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana program secara real-time oleh pemerintah daerah dan pusat.

6.5 Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan

- Kelompok PKK dan perempuan desa diprioritaskan sebagai pengelola dapur komunitas MBG, dengan dukungan pelatihan keamanan pangan dan sertifikasi higiene yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- Akses keanggotaan KDMP diperluas bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk petani kecil, buruh tani, dan pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses layanan keuangan formal.

VII. PENUTUP

Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan dua instrumen kebijakan yang, apabila diimplementasikan secara sinergis dan terencana dengan baik, berpotensi menjadi katalisator transformasi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sleman. Namun demikian, keberhasilannya tidak akan terwujud tanpa komitmen perencanaan yang kuat, tata kelola yang transparan, dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan — dari pemerintah daerah, kalurahan, pelaku usaha lokal, hingga masyarakat.

Policy brief ini disusun bukan sebagai dokumen final, melainkan sebagai titik awal dialog kebijakan yang diharapkan terus berkembang melalui Forum Grup Diskusi (FGD) dan proses konsultasi publik yang inklusif. Seluruh masukan dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2028 benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Sleman.

Disusun oleh:

Dr. Nur Widiastuti, SE., M.Si

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman

Senin, 30 Maret 2026